



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 memiliki arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun kelima dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mencermati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022.. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Larantuka, Agustus 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19651023-199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Flores Timur merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Rencana dan Program Kerja Pengawasan;
- b. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dan Barang/Kekayaan Milik Daerah;
- d. Melakukan Pengujian, Penilaian dan Evaluasi atas Laporan setiap instansi di daerah;
- e. Melakukan Pengusutan tentang Kebenaran Laporan Pengaduan, Penyimpangan dan Penyalahgunaan;
- f. Melakukan Analisis dan Menyusun Laporan serta Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pengawasan; dan
- g. Melakukan Kegiatan Administrasi lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan Dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Pendanaan, lokasim kegiatan serta kelompok penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah:

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Tahun 2022; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam tahun 2022.
- b. Menjabarkan perubahan indikator kegiatan berdasarkan Perubahan RKPd tahun 2022
- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan

Adapun tujuan yang diharapkan adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2022.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

- 2.1 Menguraikan tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan , selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya berbagai kendala eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pengawasan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Rencana Kerja (renja) Tahun 2022 memuat 3 program , 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp. 6.038.699.000,00. Realisasi capaian kinerja dan anggaran masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp.4.190.699.000,00. Realisasi anggaran mencapai Rp.1.762.749.598,00 (42,06 %). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 57% .

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1541.000.000,00 realisasi anggaran mencapai Rp.2000.656.289,00 (13,02 %). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 0.05 %.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.307.000.000,00 realisasi anggaran mencapai Rp.65.707.000,00 (21,40 %). Sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 7.64 %..

Dengan demikian capaian kinerja program sampai dengan triwulan II adalah sebesar 35,02 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.029.112.887,00. (35,82 %).

Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak terlepas dari Permasalahan yang dihadapi yang menjadi penghambat. Ada beberapa permasalahan dan solusi dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- a. Jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi ruang lingkup tanggungjawab pengawasan tidak sebanding dengan jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) ketersediaan sumber daya APIP yang ada.

Solusi yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional Pengawasan (Auditor maupun PPUPD), dan meningkatkan kapasitas tenaga fungsional melalui bimtek dan pelatihan teknis.

- b. Sarana dan prasarana serta fasilitas berupa gedung kantor dan peralatan kantor lainnya (laptop dan printer) yang kurang memadai.

Solusi yang ditempuh adalah :

- Melakukan merenovasi ruangan yang ada untuk bisa digunakan.
- Mengusulkan pembnagunan / pengadaan gedung kantor yang baru
- Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana pada Tabel. 2.2

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daaerah

Isu strategis pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Flores Timur diantaranya :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengacu pada misi ke 5 untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan pada Prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga mengacu kepada agenda Strategis Nasional Reformasi Birokrasi Aparatur Negara yaitu :

- a. Penataan kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah
- b. Penyederhanaan ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, sistem, mekanisme dan prosedur
- c. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi perencanaan kepegawaian yang menyangkut formasi, analisis jabatan, organisasi dan beban kerja, nomenklatur jabatan fungsional, standar kompetensi, kompetitif dan penempatan pegawai;

- d. Mengembangkan SAKIP, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP, penentuan target dan indikator kinerja
- e. Pelayanan public, kelembagaan pelayanan satu atap yang menyangkut landasan hukum, kewenangan dan mekanisme
- f. Pengembangan sistem pengawasan nasional (KORMONEV) secara berjenjang
- g. Pengembangan budaya kerja aparatur negara dan pementapan karakter dan jati diri aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, berkinerja produktif dan berakhlak mulia.

2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, antara lain dengan menetapkan Wilayah Bebas Korupsi pada SKPD secara bertahap dan melaksanakan Pakta Integritas, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi.

Upaya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi senantiasa terus dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Stranas PPK) dan sebagai implementasinya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku lembaga pengawas internal pemerintah, berperan dalam mendorong upaya pencegahan pemberantasan korupsi dengan melakukan MONEV terhadap rencana aksi dimaksud. Selain itu Inspektorat sejak tahun 2014 mulai melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibagi menurut wilayah binaan 4 (empat) Inspektur Pembantu.

3. Peningkatan Opini Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal Akuntabilitas Keuangan Daerah, menunjukkan kinerja yang masih belum sepenuhnya memuaskan. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, pada umumnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, sebagaimana pada Tabel. 2.4

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Belanja SKPD Tahun 2022

Belanja SKPD dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 5.446.736.856,- mengalami pengurangan (berkurang) sebesar Rp. 591.962.144,- (9,80 %) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.038.699.000,- terdiri dari :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dianggarkan sebesar Rp. 4.151.577.556,- atau berkurang sebesar Rp. 39.121.444,- (0,93%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.190.699.000,-
- b. **Program Penyelenggaraan Pengawasan.** dianggarkan sebesar Rp. 975.159.700,- atau berkurang sebesar Rp. 565.840.300,- (36,72%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.541..000.000,-
- c. **Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi** dianggarkan sebesar Rp. 319.999.600,- atau bertambah sebesar Rp. 12.999.600,- (4,06%) dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 307.000.000,-

Belanja pada Program 2 dan Program 3 dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur..

Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terinci dalam Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2022, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Agustus 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,


Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 189503 1 002

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kode	Uraian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang Dievaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan :						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Ket.		
						I			II			K	Rp	K	Rp		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	6 01 2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/8*100%							9		
	6 01 01	Inspektorat																
	6.01 01	PROGRAM SKPD			100%	6,038,699,000	11.12%	664,817,776	24.69%	1,364,295,111	35.82%	2,029,112,887	33.60%					
1	6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	4,190,699,000	20%	611,682,776	37%	1,151,068,822	56.98%	1,762,748,588	42.06%					
				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)	100 %													
				PNS yang mengikuti Bimtek/osisiasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	3 Orang													
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	9 Dokumen													
				Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APP (Orang)	10 Orang													
6	01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dok	30,000,000	56%	17,713,000	22.22%	23,515,000	77.78%	41,228,000	137.43%					
				Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	9 dok	30,000,000		17,713,000	2	23,515,000	7	41,228,000	137.43%					
6	01 01 2 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikisar Realisasi Kinerja SKPD		Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	3,421,999,000	23%	545,883,555	23.08%	1,015,047,838	46.15%	1,560,931,191	45.62%					
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14 bln	3,374,999,000	3	540,921,055	3	1,002,360,136	6	1,543,281,191	45.73%					
6	01 01 2 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa administrasi keuangan dinas (bulan)	12 bln	47,000,000	3	4,982,500	3	12,687,500	8	17,650,000	37.55%					
				Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	7	240,500,000	0.00%	-	0.00%	7,317,000	0.00%	7,317,000	3.04%					

6	01	01	2	05	08	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APD yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemfiska dan Aparatur Pengawasan.	6	orang	39,500,000	-	-	-	7,317,000	-	7,317,000	0.00%	18.52%	
							Jumlah APD yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengawasan dan Perilaku Akuntabilitas Kinerja.	5	orang	101,000,000				-	-	-	0.00%	0.00%	
6	01	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	1	Orang	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
							Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APD yang diselenggarakan	1	Orang	50,000,000				-	-	-	0.00%	0.00%	
6	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	40,058		179,400,000	22%	12,091,340	22.74%	39,019,645	44.45%	51,110,945	44.45%	28.43%	
6	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	6	komponen	4,000,000	3	513,000	1	200,000	4	713,000	66.67%	17.83%	
6	01	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	Unit	43,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
							Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4	Unit	27,000,000				-	-	-	0.00%	0.00%	
6	01	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat /bahan kebersihan kantor	16	Jenis	5,000,000	11	5,794,500	11	7,620,000	22	13,614,500	137.50%	272.20%	
							Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	44	Jenis	22,000,000				-	-	-	0.00%	0.00%	
6	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah Berang Cetak dan Pengandaian	40,000	exemplar	16,000,000	8,672	3,488,940	9,083	3,633,550	17,755	7,102,390	44.39%	44.39%	
6	01	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Jenis	2,400,000	3	225,000	3	489,200	6	714,200	600.00%	29.76%	
6	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	30	kali	60,000,000	10	2,090,000	10	26,878,895	20	28,968,895	66.67%	48.28%	
6	01	01	2	06		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219		271,200,000	15%	32,652,651	23.29%	56,150,616	37.90%	88,803,267	37.90%	32.74%	
6	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	190	Jenis	1,600,000	29	300,000	48	300,000	77	600,000	40.53%	37.50%	
6	01	01	2	06	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	35,000,000	3	6,752,651	3	7,050,616	6	13,803,267	50.00%	39.44%	
6	01	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan	17	orang	234,600,000	-	25,600,000	-	48,600,000	-	74,400,000	0.00%	31.71%	

6	01	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana/ barang milik daerah	66	48,000,000	4.48%	3,342,230	10.81%	10,016,925	15.08%	13,395,155	15.08%	27.83%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dilayani Perijinan	13	8,000,000	3	3,342,230	2	8,791,925	5	12,134,155	38.46%	151.68%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	52	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	13	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6	01	01	2	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	52	10,000,000	-	-	5	1,225,000	5	1,225,000	9.62%	12.25%
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	100 %	1,541,000,000	0.79%	42,385,000	3.85%	158,271,289	4.64%	200,656,289	0.05%	13.02%
						Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2	Obrik					-			
6	01	02	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan	639	876,000,000	1.41%	30,850,000	5.48%	68,286,289	6.89%	99,136,289	0.01%	11.32%
6	01	02	2	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Obyek Kinerja dan Keuangan	2	200,000,000	2	13,040,000	2	19,978,400	4	33,018,400	200.00%	18.51%
6	01	02	2	01	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan	562	435,000,000	1	4,150,000	-	1,162,300	1	5,312,300	0.18%	1.22%
6	01	02	2	01	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen kinerja yang Direviu	2	25,000,000	1	6,990,000	1	6,800,000	2	13,760,000	100.00%	55.04%
6	01	02	2	01	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Direviu	2	25,000,000	-	-	1	11,120,000	1	11,120,000	50.00%	44.48%
6	01	02	2	01	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Tindak Lanjut hasil temuan	71	191,000,000	5	6,700,000	31	29,225,569	36	35,925,569	50.70%	18.81%
6	01	02	2	02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	578	665,000,000	0.17%	11,535,000	0.69%	89,985,000	0.87%	101,520,000	0.00%	15.27%

6	01	02	2	02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Temuan Kegiatan Negara yang dilandakandji	12	Obik	250,000,000	-	515,000	-	3,305,000	-	3,820,000	-	1.53%
6	01	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obyek Audit Kinerja dan Keuangan Tujuan Tertentu	566	Obik	415,000,000	1	11,020,000	4	88,680,000	5	97,700,000	0.28%	23.54%
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pengujian Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	100 %		307,000,000	12.50%	10,790,000	33.33%	54,957,000	45.83%	65,787,000	0.46%	21.40%
							Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus dilandakandji	2 %	Obik						-	-		
							Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100 %	%						-	-		
6	01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	3	Dokumen	60,000,000	0.00%	-	0.00%		0.00%	-	0.00%	0.00%
6	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3	Dokumen	60,000,000	-	-	-		-	-	0.00%	0.00%
6	01	03	2	02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	12		247,000,000	25.00%	10,750,000	66.87%	94,957,000	91.67%	65,787,000	7.54%	26.60%
6	01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kecamatan yang diberikan Pendampingan dan asistensi	7	Kec	46,000,000	3	9,000,000	4	8,405,000	7	17,485,000	100.00%	38.86%
6	01	03	2	03		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kal	202,000,000	-	1,670,000	4	46,552,000	4	48,222,000	80.00%	23.87%

Larantuka, Agustus 2022

Manu

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

Antony Labi Raya, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 196510231995031002

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
I	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Jumlah pelayanan 1 jasa surat menyurat			100 kali	110 kali	110 kali	110 kali	110 kali	110 kali	110 kali		
	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
3	Jumlah kendaraan yang dilayani			20 unit	22 unit	22 unit	13 unit	13 unit	22 unit			
4	Frekuensi Pembayaran gaji dan tunjangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
5	Jumlah layanan jasa kebersihan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
6	Jumlah jenis ATK			54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis		
7	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan			610 paket	625 paket	625 paket	610 paket	625 paket	625 paket	625 paket		

	Jumlah komponen				9 komponen	9 komponen	9 komponen	9 komponen	9 komponen	
8	instalasi listrik penerangan bangunan kantor									
9	Jumlah bahan bacaan			bahan bacaan 56	bahan bacaan 56	1 bahan bacaan	3 bahan bacaan	1 bahan bacaan	56 bahan bacaan	
10	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			74 kali	74 kali		7 kali	4 kali	74 kali	
11	jumlah tenaga pendukung teknis perkantoran			14 orang	14 orang		17 orang	17 orang	14 orang	
II	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Jumlah unit gedung kantor yang di bangun			100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
2	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional			2 unit	2 unit		0 unit	0 unit	2 unit	
	Roda empat									
	Roda dua			2 unit	2 unit		0 unit	0 unit	2 unit	
3	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			8 unit	8 unit		0 unit	0 unit	8 unit	
4	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			15 unit	15 unit		0 unit	0 unit	15 unit	

5	Jumlah pengadaan meubeleurn		7 unit	7 unit	0 unit	0 unit	7 unit	
6	Jumlah unit rumah dinas yang di pelihara		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
7	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara		2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	2 unit	
8	Jumlah unit kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara		20 unit	22 unit	13 unit	13 unit	22 unit	
9	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara		44 unit	59 unit	44 unit	52 unit	59 unit	
III	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP.		2 kali	2 kali	2 kali	- kali	2 kali	
1	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan		1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	

	Jumlah Bimbingan Teknis 2 peningkatan kapabilitas yang diselenggarakan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	
IV	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	
1	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan			9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	
V	outcome : prosentase penguatan sistem pengawasan dan pengendalian Internal (100%)									
1	Jumlah obyek pemeriksaan			468 obrik	468 obrik	468 obrik	468 obrik	468 obrik	468 obrik	
	- Pemeriksaan Reguler PKPT			9 obrik	9 obrik	9 obrik	12 obrik	7 obrik	9 obrik	
	- Penilaian angka kredit P2UPD			2 kali	2 kali		2 kali	2 kali		
	- Penilaian angka kredit Auditor			2 kali	2 kali		2 kali	2 kali		

- Evaluasi LAKIP OPD				30 obrik	30 obrik	31 obrik	6 obrik	30 obrik	
- Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
- Reviu LKD			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
- Reviu LKD Semester I			30 kali	30 kali	1 kali	0 kali	30 kali	30 kali	
- Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan barang jasa dan penyerapan anggaran dana desa			4 kali	4 kali	1 kali	3 kali	4 kali	4 kali	
- Reviu Dokumen Perencanaan terdiri dari :			33 kali	33 kali	32 kali	32 kali	33 kali	33 kali	
* Reviu RPJMD			1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	
* Reviu RKPD			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
* Reviu RKA			30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	
- Pemeriksaan dana BOS,			6 obrik	6 obrik	0 obrik	6 obrik	6 obrik	6 obrik	
- Monev Reformasi Birokrasi			1 obrik	1 obrik	0 obrik	1 obrik	1 obrik	1 obrik	
- Audit Kinerja atas pelaksanaan ADD			1 obrik	1 obrik	0 obrik	0 obrik	1 obrik	1 obrik	
- Audit Kinerja pada SKPD			8 obrik	8 obrik	1 obrik	0 obrik	8 obrik	8 obrik	
- Audit Kinerja atas pelaksanaan dana desa.			1 obrik	1 obrik	0 obrik	0 obrik	1 obrik	1 obrik	

- Pemeriksaan Serentak Tutup Buku			347 obrik	347 obrik	529 obrik	530 obrik	347 obrik	
Jumlah kasus 2 pengaduan yang ditangani		48 kasus	53 kasus	53 kasus	29 kasus	19 kasus	53 kasus	
Output: Jumlah 3 tindak lanjut hasil temuan		40 obrik	45 obrik	45 obrik	2 obrik	1 obrik	45 obrik	
- Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP		40 obrik	45 obrik	45 obrik	45 obrik	58 obrik	45.0 obrik	
- Jumlah Rapat Koordinasi dan rapat pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan		7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	3 kali	7 kali	
- Jumlah rapat Pemutakhiran Data		7 kali	3 kali	3 kali	4 kali	1 kali	3 kali	
Output:								
Jumlah Laporan MONEY		12 laporan	12 laporan	12 laporan	14 laporan	11 laporan	12 laporan	
Jumlah 4 koordinasi pengawasan		4 kali	4 kali	4 kali	0 kali	1 kali	4 kali	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 5 yang diinventarisir		70 LHP	77 LHP	77 LHP	45 LHP	17 LHP	77 LHP	

6	persentase penurunan praktek pungutan liar	85 %	99 %	99 %	85 %	99 %	99 %	
7	Meningkatnya Tingkat maturitas penerapan SPIP	4 kali	4 kali	4 kali	- kali	4 kali	4 kali	
VI	Prosentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP	22 orang	22 orang	22 orang	2 orang	5 orang	22 orang	
1	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	5 orang	5 orang	5 orang	1 orang	5 orang	5 orang	
2	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan Tennis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja	17 orang	17 orang	17 orang	1 orang	0 orang	17 orang	
3	Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapabilitas							

VII	Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
1	Jumlah Dokumen sistem dan prosedur pengawasan			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	

Larantuka, Agustus 2022

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur

Muan

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pemula Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Flores Timur

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT DAERAH										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota				4,190,699,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota			100	4,151,577,556	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	4,190,699,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	4,151,577,556	
			Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)	100				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)	100		
			PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	3				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	-		
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	9				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	9		
			Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APiP (Orang)	10				Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APiP (Orang)	2		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	9	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	9	55,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,421,599,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,658,855,480	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	3,374,599,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	3,611,855,480	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Jasa administrasi keuangan dinas (bulan)	12	47,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Jasa administrasi keuangan dinas (bulan)	12	47,000,000	
	Administrasi Kewagralan Perangkat Daerah				240,500,000	Administrasi Kewagralan Perangkat Daerah				120,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (orang)	6	39,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (orang)	2	120,000,000	
		Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. (orang)	5	101,000,000		Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. (orang)	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Larantuka	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan yang diselenggarakan (kali)	1	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Larantuka	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan (kali)	-	-	
		Larantuka	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP yang diselenggarakan (kali)	1	50,000,000		Larantuka	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP yang diselenggarakan (kali)	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				179,400,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84,397,741	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	Larantuka	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan (komponen)	6	4,000,000	Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	Larantuka	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (komponen)	6	1,997,741	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor (unit)	5	43,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor (unit)	-	-	-
		Larantuka	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	4	27,000,000		Larantuka	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah alat /bahan kantor kebersihan kantor (jenis)	16	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah alat /bahan kebersihan kantor (jenis)	12	15,288,000	
		Larantuka	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	44	22,000,000		Larantuka	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	42	14,714,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (exemplar)	40,000	16,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (exemplar)	21,222	15,000,000	
		Larantuka	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	1	2,400,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	1	2,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	30	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	11	35,000,000	
		Larantuka	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		271,200,000	Penyediaan Jasa Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		199,385,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka	Jumlah Jasa Surat Menyurat (jenis)	190	1,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Larantuka	Jumlah Jasa Surat Menyurat (jenis)	12	1,200,000	
		Larantuka	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	35,000,000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	34,985,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Jasa tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan (orang)	17	234,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Jasa tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan (orang)	15	163,200,000	
						Penelitian Barang Milik Daerah Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah				33,939,335	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas	Larantuka	Jumlah Kendaraan Operasional yang dilayani Perijinan (unit)	13	8,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas	Larantuka	Jumlah Kendaraan Operasional yang dilayani Perijinan (unit)	12	3,900,000	

Operasional atau lainnya

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	13	20,000,000		Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	1	24,080,835		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	2	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1	2,988,500		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (unit)	52	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	13	2,950,000		
	Inspektorat Daerah				1,848,000,000	Inspektorat Daerah				1,295,159,300		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Pengutan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	1,541,000,000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Pengutan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	975,159,700		
			Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2				Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan		876,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan		451,284,700		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek audit Kinerja dan Keuangan (obrik)	2	200,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek audit Kinerja dan Keuangan (obrik)	16	126,120,000		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	562	435,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	11	172,164,800		
	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen kinerja yang Direview (dokumen)	2	25,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen kinerja yang Direview (dokumen)	2	28,000,000		
	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Direview (dokumen)	2	25,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Direview (dokumen)	2	24,999,900		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Kabupaten Flores Timur	4 Jumlah Tindak Lanjut hasil temuan (Obrik)	5 71	6 191,000,000	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Kabupaten Flores Timur	9 Jumlah Tindak Lanjut hasil temuan (Obrik)	10 44	11 100,000,000	12
3	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				665,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				523,875,000	
	Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Temuan Kerugian Negara yang ditindaklanjuti (temuan)	12	250,000,000	Peningkatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Temuan Kerugian Negara yang ditindaklanjuti (temuan)	6	82,500,000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek Audit Kinerja dan Keuangan Tujuan Tertentu (obrik)	566	415,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Obyek Audit Kinerja dan Keuangan Tujuan Tertentu (obrik)	540	441,375,000	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	307,000,000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	319,999,600	
			Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus ditindaklanjuti (obrik)	2				Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus ditindaklanjuti (obrik)	2		
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)	100				Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)	100		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				60,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				34,999,800	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (dokumen)	3	60,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (dokumen)	3	34,999,800	
	Pendampingan dan Asistensi				247,000,000	Pendampingan dan Asistensi				284,999,800	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi (kecamatan)	7	45,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Flores Timur	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi (kecamatan)	5	35,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
1	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kabupaten Flores Timur	4 Jumlah Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (kali)	5 5	6 202.000.000	7 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kabupaten Flores Timur	9 Jumlah Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (kali)	10 27	11 249.999.800	12

Larantuka, Agustus 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, 



Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022						Bertambah/ (Berkurang) Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					PN	PD	
					Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi					
6-1	0-0	0-0	01	INSPEKTORAT DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10-8-5	11	12	13
x	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota			6,038,699,000			5,446,736,856		(591,962,144)			
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		100	4,190,699,000		100	4,151,577,556		(39,121,444)			PP
						100			100						
						3			.						
						9			9						
						10			2						

x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000	Larantuka	9	55,000,000		25,000,000		PP
x	xx	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	9	30,000,000	Larantuka	9	55,000,000	Larantuka	25,000,000	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,421,599,000			3,658,855,480		237,256,480		PP
x	xx	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	3,374,599,000	Larantuka	14	3,611,855,480	Larantuka	237,256,480	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa administrasi keuangan dinas (bulan)	12	47,000,000	Larantuka	12	47,000,000	Larantuka		APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepgawalan Perangkat Daerah			240,500,000			120,000,000		(120,500,000)		PP
x	xx	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (orang)	6	39,500,000	Larantuka dan Luar Daerah	2	120,000,000	Larantuka dan Luar Daerah	80,500,000	APBD II (DAU)	
					Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (orang)	5	101,000,000	Larantuka dan Luar Daerah	-	-	Larantuka dan Luar Daerah	(101,000,000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan (kali)	1	50,000,000	Larantuka	-	-	Larantuka	(50,000,000)	APBD II (DAU)	

[illegible]

x	x	01	2.08	04	Jumlah Jasa tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan (orang)	17	234,600,000	Larantuka	15	163,200,000	Larantuka	(71,400,000)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.09	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									PP
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48,000,000			33,939,335		(14,060,665)		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	13	8,000,000	Larantuka	12	3,900,000	Larantuka	(4,100,000)	APBD II (DAU)	
					Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	13	20,000,000	Larantuka	1	24,090,835	Larantuka	4,090,835		
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	10,000,000	Larantuka	1	2,998,500	Larantuka	(7,001,500)	APBD II (DAU)	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52	10,000,000	Larantuka	13	2,950,000	Larantuka	(7,050,000)	APBD II (DAU)	
6	01				Inspektorat Daerah		1,848,000,000			1,295,159,300		(552,840,700)		
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1,541,000,000		100	975,159,700		(565,840,300)		PU
					Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)									
					Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2			2					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		876,000,000			451,284,700		(424,715,300)		PU
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	200,000,000	Kabupaten Flores Timur	16	126,120,000	Kabupaten Flores Timur	(73,880,000)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	562	435,000,000	Kabupaten Flores Timur	11	172,164,800	Kabupaten Flores Timur	(262,835,200)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	2	25,000,000	Kabupaten Flores Timur	2	28,000,000	Kabupaten Flores Timur	3,000,000	APBD II (DAU)	

6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Direview (dokumen)	2	25,000,000	Kabupaten Flores Timur	2	24,999,900	Kabupaten Flores Timur	(100)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindak Lanjut hasil temuan (Obrik)	71	191,000,000	Kabupaten Flores Timur	44	100,000,000	Kabupaten Flores Timur	(91,000,000)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			665,000,000			523,875,000		(141,125,000)		PU
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Temuan Kerugian Negara yang ditindaklanjuti (temuan)	12	250,000,000	Kabupaten Flores Timur	6	82,500,000	Kabupaten Flores Timur	(167,500,000)	APBD II (DAU)	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obyek Audit Kinerja dan Keuangan Tujuan Tertentu (obrik)	566	415,000,000	Kabupaten Flores Timur	540	441,375,000	Kabupaten Flores Timur	26,375,000	APBD II (DAU)	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pengutan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	307,000,000		100	319,999,600		12,999,600		PP
						Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus ditindaklanjuti (obrik)	2			2					
						Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)	100			100					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			60,000,000			34,999,800		(25,000,200)		PP
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (dokumen)	3	60,000,000	Kabupaten Flores Timur	3	34,999,800	Kabupaten Flores Timur	(25,000,200)	APBD II (DAU)	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			247,000,000			284,999,800		37,999,800		PP

6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi (kecamatan)	7	45.000.000	Kabupaten Flores Timur	5	35.000.000	Kabupaten Flores Timur	(10.000.000)	APBD II (DAU)	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (kali)	5	202.000.000	Kabupaten Flores Timur	27	249.999.800	Kabupaten Flores Timur	47.999.800	APBD II (DAU)	

Larantuka, Agustus 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, *A*

